



RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	√			
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	√			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	√			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√			
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	√			
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	√			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√			
5	BAB V	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, September 2025



Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Henny Maryuniwati, S.STP
Pembina (IV/a)
Nip. 19830605 200112 2002

Diverifikasi :		September 2025	Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.		
	Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung		
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.		
	Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung		

Mengetahui;
Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, September 2025



Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Henny Maryuniwati, S.STP
Pembina (IV/a)

Nip. 19830605 200112 2002

Mengetahui;



Plt. Kepala Bapperida
Kota Bandar Lampung,

Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

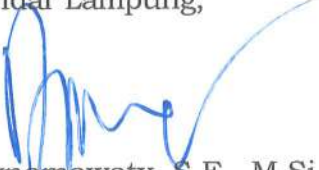
Diverifikasi : September 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si. Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung	
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H. Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung	

FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	Telah sesuai dengan RKPD Tahun 2026
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah sesuai dengan RKPD Tahun 2026

Diverifikasi : September 2025		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si.	
Kabid Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Bandar Lampung		
2	RENI MARITA SUDEMI, S.H., M.H.	
Fungsional Perencana Ahli Muda Bapperida Kota Bandar Lampung		

Mengetahui;
 Plt. Kepala Bapperida
 Kota Bandar Lampung,


 Dini Purnamawaty, S.E., M.Si.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700218 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2026 ini.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu keharusan bagi setiap PERANGKAT DAERAH dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota Bandar Lampung no.1 th 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bandar Lampung, September 2025
Plt, Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana



Henny Maryuniwati.,S.STP
NIP. 19830605 200112 2002

LAMPIRAN 16
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk setiap Daerah (Kota/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era Otonomi Daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperiukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kota Bandar Lampung.

Renja Perangkat Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);
26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 29);

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2026 sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah :

- a. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam merumuskan alokasi program dan kegiatan pembangunan Tahun 2026;
- b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2026;
- c. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2026 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja dan Sasaran dengan Pagu Indikatif tahun yang direncanakan serta prakiraan maju tahun berikutnya

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Penyediaan Bahan logistik kantor.
- h. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- a. Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Pengadaan Mebel.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **83.37** persen.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan kajian dampak kependudukan.
- b. Penyediaan data dan informasi keluarga.
- c. Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangsa Kencana).

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **31.29** persen.

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat an obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB.
- b. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
- c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

- a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **45.30** persen.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- c. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai **60.37** persen.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Evaluasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana tahun 2024 menunjukkan data yang kurang maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Di tahun 2024 realisasi pelaksanaan program kegiatan hanya mencapai **60.37** persen. Hal ini disebabkan karena anggaran yang harus di efisiensi dan rasionalisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari Sub kegiatan 37 (tiga puluh tujuh). Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tahun 2021-2026 hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang keluarga berencana. Terlampir TC.30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung pada tahun 2026 melaksanakan 4 (empat) program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan.

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek positif yang berakibat pada munculnya potensi-potensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang baru, tetapi bisa pula berupa pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang tinggi serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan dan permasalahan sosial lainnya yang akan bertambah saat jumlah penduduk telah malampaui kapasitas ruang untuk menampungnya

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan, tak dapat dihindang, tak dapat dikurangi. Yang bisa dilakukan dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya dalam masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan dan meminimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak memanfaatkan momentum ini, maka Bandar Lampung justru akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung terutama dalam hal ini dipromotori oleh Program

Pengendalian Penduduk hendaknya memperhatikan kondisi kependudukan baik saat ini maupun pada waktunya Bonus Demografi telah mencapai puncak pengaruhnya terhadap stabilitas Indonesia di tahun 2026 nanti.

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of opportunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut.

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu terjadinya peningkatan penduduk usia tua sementara transisi usia muda menjadi usia produktif belum sempurna. Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan sehingga akan mendorong terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya dalam hal ini adalah Program Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam penyelenggaraan Pelayanan KB.

2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam keluarga.
3. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan Konseling.
4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan akibat tingginya *unmet need* dan ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi
5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas permasalahan kependudukan itu sendiri seperti cepatnya laju pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau ibu melahirkan, perubahan struktur umur, pergerakan penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya. Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Diperlukan kebijakan pembangunan dan kependudukan yang integratif untuk mengendalikan kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan perekonomiannya.

Perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas penduduk saja, tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini yakni mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya SDGs yang saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ini

dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Disamping itu rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tahun 2026 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Penetapan strategi yang akan dilakukan untuk menjawab pelaksanaan program tahun 2026 dengan terlebih dahulu mengevaluasi dan menganalisis berbagai permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Berbagai isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 1. Perlu ditetapkan definisi peserta KB mandiri: peserta atas biaya mandiri (biaya mandiri di pelayanan swasta atau pemerintah).
 2. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB. Untuk itu setiap pelatihan medis IUD dan implan peserta latih juga harus disiapkan sarannya.
 3. Pengembangan kebijakan pelayanan KB swasta.
 4. Sarana pendukung pelayanan KB di swasta perlu diperkuat.
 5. Kegiatan momentum/bhaksos harus disertai kebijakan MKJP, di luar MKJP dilayani di pelayanan rutin.

- Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 1. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera.
 2. Pengembangan kelompok-kelompok pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga terutama untuk kelompok paripurna.
 3. Perluasaan jangkauan keluarga dalam pembangunan ketahanan.
 4. Kesejahteraan keluarga melalui multi media.

- Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
 1. Sistem pencatatan dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB, dan Pemberdayaan perempuan.
 2. Penyediaan data basis dan data terpilih.

- Dukungan Manajemen;

1. Penguatan kelembagaan tingkat Kota berdasarkan UU 52 tahun 2009, serta penguatan mekanisme operasional kelembagaan KB di lini lapangan (Pemberdayaan PPLKB/PLKB, IMP, dan Kader KB).

Tujuan dan sasaran dari renja adalah :

- Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandar Lampung dan sumber pembiayaan APBN.
- Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.
- Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung dalam konstalasi regional (propinsi) dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi program keluarga berencana untuk menunjang sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Sebagai panduan penyusunan program dan kegiatan yang terpadu, terarah dan terukur bagi jajaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah, dan DPRD Kota Bandar Lampung.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan:

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, disebutkan juga dalam undang-undang tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian di lain pihak. Hal tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dengan pesat. Di samping

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur umur penduduk yang kurang seimbang, masalah lainnya adalah penyebaran penduduk yang juga kurang merata. Penyebaran penduduk yang kurang merata ini disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda di setiap daerah.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu disebabkan oleh migrasi atau perpindahan penduduk serta angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya.

b. Penyusunan program dan kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menempati program dan kegiatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Renstra tahun 2025-2029. Sedangkan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**A. KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- a. Pengadaan Mebel

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal

Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan kajian dampak kependudukan.
- b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

- c. Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana)

3. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

- a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB.
- b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- a. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.
- c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
- c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).

Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
- b. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Tabel. C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kota Bandar Lampung**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran	Rencana awal Tahun (Tahun Rencana 2026)					Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun (2027)	
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	98	5.502.992.764	APBD		98	5.715.056.039.66
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	98	16.308.927			98	25.304.967

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Laporan	4	16.308.927	APBD		4	25.304.967
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan PERANGKAT DAERAH tepat waktu	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	100	4.090.436.351			100	4.315.608.556.66
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Orang/bulan	29	3.963.030.500	APBD		29	4.161.202.705.66
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	1	147.196.520	APBD		1	147.196.520
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Laporan	1	7.209.331	APBD		1	7.209.331

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas SDM dalam pemenuhan kompetensi jabatan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	80	15.000.000			80	15.000.000
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Orang	29	15.000.000	APB D		29	15.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional PERANGKAT DAERAH	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	98	162.561.446	APBD		98	202.239.516
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Paket	1	4.878.514	APBD		1	5.122.439
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Paket	1	54.564.826	APBD		1	57.293.067
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Paket	1	4.996.629	APBD		1	5.246.460
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Paket	1	25.000.000	APBD		1	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Paket	1	10.000.000	APBD		1	43.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	4	4.000.000	APBD		4	4.000.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Laporan	1	59.121.477	APBD		1	62.077.550
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Person	98	135.000.000			98	65.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	5	135.000.000			5	65.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional PERANGKAT DAERAH	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Person	100	662.000.000			100	662.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Laporan	1	158.000.000	APBD		1	158.000.000
	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Laporan	1	504.000.000	APBD		1	504.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana PERANGKAT DAERAH	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	98	421.690.000			98	429.903.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	1	45.430.000	APBD	1	45.430.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	3	149.680.000	APBD	3	157.164.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	5	14.580.000	APBD	5	15.309.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Unit	1	212.000.000	APBD	1	212.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 TAHUN (ASFR 15-19)	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Angka	18	142.783.243.61	APBD	18	89.909.476
		Total Fertility Rate (TFR)	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	2.14			2.14	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebutuhan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								

	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	1	65.359.644	APBD		1	12.485.877
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah KAB/Kota			Persen	7 Kegiatan	77.423.599.61			7 Kegiatan	77.423.599
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	1	25.636.042	APBD		1	25.636.042
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	1	25.914.725	APBD		1	25.914.725
	Pemetaan program pembangunan keluarga,kependudukan, dan keluarga berencana (Bangsa Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Dokumen	1	25.872.832.,61	APBD		1	25.872.832.

		Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive (mCPR)			74.50		10.275.221.938.96			76.50	9.305.334.410
		Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)			8.65					8.40	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas PP Dan KB	Bandar Lampung	Persen	2 Kegiatan	141.790.883			2 Kegiatan	141.790.883
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Dokumen	1	104.684.795	APBD		1	104.684.795
		Pengendalian Program KKBPK	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Laporan	12	37.106.088	APBD		12	37.106.088

			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kebutuhan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Persen	2 Kegiatan	7.796.671.363.96			2 Kegiatan	6.898.072.815
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Balai penyuluh KB	Bandar Lampung	Unit	2	71.000.000	APBD		2	74.550.000
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader PPKBD dan SUB PPKBD	Bandar Lampung	Orang	2.900	7.725.671.363.96	APBD		2.900	6.823.522.815
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsiii serta pelaksanaan Pellaayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Laporan	12 Laporan	1.180.868.892			12 lap	1.107.829.912

			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Unit	1	135.811.692	APBD		1	135.811.672
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes dan Jejaringnya	Bandar Lampung	Laporan	12	961.537.200	APBN /DAK NON FISIK		12	888.498.240
			Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Laporan	12	83.520.000	APBD		12	83.520.000

				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung KB	Bandar Lampung	Persen	2 Kegiatan	1.155.890.800		2 Kegiatan	1.157.640.800
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kampung KB	Bandar Lampung	Kampung KB	1	35.000.000		1	36.750.000
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Kampung KB	1	549.445.400	APBN /DAK NON FISIK	4	549.445.400
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Masyarakat Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	Dokumen	1	571.445.400	APBN /DAK NON FISIK	1	571.445.400

			(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan						N FIS IK			
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kader BKB	Bandar Lampung	Kelompok	134	4.542.662.670..35	AP BD		134	4.604.976.859
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Organisasi	Bandar Lampung	Persen	2kegiatan	105.244.190	AP BD		2 kegiatan	110.506.402

				Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kelompok Kegiatan	Bandar Lampung	Laporan	1	87.109.720	AP BD		1	19.041.195	
				Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Organisasi	Bandar Lampung	Laporan	1	18.134.470	AP BD		1	91.465.207	
				TOTAL BELANJA							23.532.168.751.92				22.557.901.787.66

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai berikut:

Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.304.967	APBD	Bandar Lampung	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.963.030.500	APBD	Bandar Lampung	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	147.196.520	APBD	Bandar Lampung	

				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.209.331	APBD	Bandar Lampung
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000	APBD	Bandar Lampung
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.878.514	APBD	Bandar Lampung
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54.564.826	APBD	Bandar Lampung
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.996.629	APBD	Bandar Lampung
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25.000.000	APBD	Bandar Lampung

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000	APBD	Bandar Lampung	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4.000.000	APBD	Bandar Lampung	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.121.477	APBD	Bandar Lampung	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135.000.000	APBD	Bandar Lampung	
NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	KET
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	158.000.000	APBD	Bandar Lampung	
				Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	504.000.000	APBD	Bandar Lampung	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45.430.000	APBD	Bandar Lampung	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	149.680.000	APBD	Bandar Lampung	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14.580.000	APBD	Bandar Lampung	
				Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	212.000.000	APBD	Bandar Lampung	

	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebutuhan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	65.359.644	APBD	Bandar Lampung	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	25.636.042	APBD	Bandar Lampung	
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	25.914.725	APBD	Bandar Lampung	
			Pemetaan program pembangunan keluarga,kependudukan,dan keluarga berencana (Bangsa Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	25.872.832.16	APBD	Bandar Lampung	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	37.106.088	APBD	Bandar Lampung	

			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	141.790.883	APBD	Bandar Lampung
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	71.000.000	APBD	Bandar Lampung
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	7.725.671.363.96	APBD	Bandar Lampung
		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	135.811.692	APBD	Bandar Lampung
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	961.537.200	APBN/ DAK NON FISIK	Bandar Lampung
			Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	83.520.000	APBD	Bandar Lampung
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	35.000.000	APBD	Bandar Lampung

		Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	549.445.400	APBN/ DAK NON FISIK	Bandar Lampung	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	571.445.400	APBN/ DAK NON FISIK	Bandar Lampung	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	25.000.000	APBD	Bandar Lampung	
			Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.691.945	APBD	Bandar Lampung	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling	4.542.662.670.35	APBD	Bandar Lampung	

			Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Dibentuk				
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2.917.572.000	APBN/ DAK NON FISIK		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	87.109.720	APBD	Bandar Lampung	
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	18.134.470	APBD	Bandar Lampung	
		JUMLAH			23.532.168.751.92			

BAB V

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG



EVA DWIANA